



Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)

Website: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com



Implementasi dan Optimalisasi Lima Program Bina Desa di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Johannes Sinarta Siagian Universitas Pancasila johannessinarta23@gmail.com Meisya Aliya Putri Universitas Pancasila meisyaaliyaputri@gmail.com Muhammad Fhiqry Almaududy Universitas Pancasila mfhiqryalmaududy@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Siagian, J. S., Putri, M. A., & Almaududy, M. F. (2026). Implementasi dan Optimalisasi Lima Program Bina Desa di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 2107-2116

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Bina Desa merupakan wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan mengintegrasikan lima program utama, yaitu *Focus Group Discussion (FGD)*, *Teaching*, Penyuluhan Hukum, Pemeriksaan Kesehatan, dan Pembangunan Infrastruktur Desa. Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan prioritas masyarakat, memperluas kesadaran hukum, meningkatkan derajat kesehatan, dan mendukung ketersediaan sarana prasarana dasar desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif antara tim pelaksana serta masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat, meningkatnya partisipasi belajar anak-anak, tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan preventif, serta tersedianya fasilitas infrastruktur yang lebih layak. Optimalisasi kelima program secara terintegrasi terbukti memberikan dampak sosial. Dengan demikian, model Bina Desa berbasis integrasi program ini dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Kata Kunci: Bina Desa, Pengabdian Masyarakat, Optimalisasi

Abstract

Community service activities through the Village Development program are a manifestation of the implementation of the Tri Dharma Perguruan Tinggi (Three Pillars of Higher Education) in improving the quality of life of the community in an integrated manner. This activity was carried out in Cioray Hamlet, Leuwikaret Village, Bogor Regency, West Java, by integrating five main programs, namely Focus Group Discussion (FGD), Teaching, Legal Counseling, Health Checkups, and Village Infrastructure Development. The objectives of this activity were to identify priority issues in the community, raise legal awareness, improve health, and support the availability of basic village infrastructure. The implementation method used a participatory and collaborative approach between the implementation team and the local community. The results of the activity showed an increase in the community's understanding of the law, increased participation in children's learning, growing awareness of the importance of preventive health, and the availability of more adequate infrastructure facilities. The optimization of the five programs in an integrated manner has proven to have a social impact. Thus, this program-based village development model can be a reference in the implementation of sustainable community service based on the real needs of the community.

Keywords: Village Development, Community Service, Optimization

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan menjadi dasar utama bagi berbagai mata pencaharian masyarakat yang mendiaminya. Di wilayah pedesaan, sumber daya alam seperti lahan pertanian, hutan, dan perairan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Ketergantungan terhadap sumber daya alam mendorong agar terjadinya kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberlanjutan mata pencaharian tersebut. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pemanfaatan sumber daya alam cenderung kurang optimal dan berisiko menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam maupun manusia dibutuhkan program yang bertahap dan berkelanjutan demi tercapainya kemanfaatan bersama. Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan keterampilan maupun pengetahuan yang kelak dapat diterapkan serta dibagikan kepada masyarakat.

Perlu diketahui Perguruan Tinggi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi. Pada dasarnya Perguruan Tinggi wajib memegang teguh Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berupa Pendidikan dan Penalaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui tiga kewajiban tersebut setiap Tenaga Pendidik/Dosen dan Mahasiswa/i diajak bukan hanya mengetahui, tetapi mengimplementasikannya dengan pengetahuan yang dimiliki. Salah satu kewajiban yaitu "Pengabdian kepada Masyarakat" merupakan suatu amanat yang terkadang dilupakan bahkan tak dilakukan. Kewajiban tersebut menjadi amanat bagi Perguruan Tinggi di Indonesia sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang menyatakan "Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat."

Pengabdian kepada masyarakat dan program bina desa memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan akademik untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Bina desa merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan pengabdian tersebut, yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa secara terencana, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui program bina desa, kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial atau jangka pendek, tetapi diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan, hukum, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, bina desa mampu menjadi media strategis bagi perguruan tinggi untuk menyalurkan pengetahuan akademik ke dalam praktik nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat desa, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Salah satunya adalah Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor yang jauh dari hiruk pikuk Kota. Dusun Cioray memiliki sumber daya alam seperti lahan pertanian, kebun, dan potensi lingkungan sekitar yang menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat. Namun, keterbatasan keterampilan, akses pengetahuan, dan pengelolaan yang belum optimal sering kali menyebabkan mata pencaharian masyarakat belum berkembang secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya dusun yang jauh dari dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis melalui pemberdayaan, pendampingan, dan peningkatan literasi agar potensi sumber daya desa dapat dikelola secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan dalam pengetahuan hukum menjadi tantangan bagi warga sekitar. Keberadaan perusahaan PT. Indocement Prakarsa Tbk di sekitar wilayah dusun dapat memberikan manfaat maupun ancaman. Hadirnya perusahaan tersebut kerap kali menimbulkan keresahan walaupun perusahaan telah memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau dana tanggung jawab sosial maupun bentuk dukungan lainnya. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan mekanisme pengelolaan dana tersebut sering menyebabkan potensi manfaat tidak dimanfaatkan secara optimal. Selain itu Dusun Cioray yang sangatlah miris dalam infrastruktur sekolah yaitu tidak layaknnya plafon, kursi, meja dan tembok di MI Hidayatul Islam serta tidak adanya pembakaran sampah sebagai sarana mengingat jauhnya TPA Galuga yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Bogor.

Pengabdian masyarakat yang telah diamanatkan melalui UU No. 12 Tahun 2012 menjadi sebuah tantangan bagi Mahasiswa/i untuk menerapkannya dalam program kerja bernama Bina Desa 2025. Oleh karena itu, melalui masalah yang telah dituangkan sejalan dengan Visi Bina Desa FHUP 2025 berupa “Mewujudkan Desa Mandiri melalui Penguatan Hukum, Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”. Maka, Visi tersebut juga menjadi amanah yang wajib diperjuangkan melalui kontribusi nyata antar Warga Dusun Cioray, Mahasiswa/i, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi lapangan untuk memahami pelaksanaan lima program bina desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu perangkat desa, tokoh masyarakat, peserta kegiatan, dan tim pelaksana program yang dianggap mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, data dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Sekaligus menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Lima Program Bina Desa di Dusun Cioray

Pelaksanaan program bina desa di Dusun Cioray meliputi lima kegiatan utama, yaitu *Forum Group Discussion (FGD)*, *teaching*, Penyuluhan hukum, pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Hasil observasi dan wawancara, seluruh program dapat dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang masif, terutama karena pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan hasil observasi pra kegiatan oleh para tim pelaksana sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

1. Forum Group Discussion

Kegiatan *FGD* menjadi tahap awal yang penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Dusun Cioray. Dalam kegiatan *FGD* ini kami mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membahas semua permasalahan masyarakat diantaranya. Melalui forum diskusi ini, masyarakat tidak hanya dapat memahami mengenai permasalahan dan mengenali kebutuhan tetapi juga masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait pendidikan, kesehatan, hukum, dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program (Cohen, J.M. & Uphoff, 1980).

a. *Forum Group Discussion* pertama diawali dengan tema Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) dan pentingnya tanah bersertifikat. Melalui hasil penelusuran yang penulis lakukan, bahwa masih banyak rumah warga yang berdiri tanpa memiliki alas hak yang dimana berpotensi akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga melalui *FGD* warga kampung Cioray dapat menerima wawasan hukum dan tata cara dalam memperoleh alas hak atas tanah yang ditempati, walaupun kenyataannya sejak pada Juni 2025 penulis mendapati bahwa BPN Kabupaten Bogor kerap kali lambat dan adanya pungli dalam pembuatan sertifikat tanah (Metroheadline.net, n.d.). Hasil *FGD* menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Cioray memiliki kesadaran terhadap persoalan sertifikasi tanah yang belum mereka miliki, sehingga peran Badan Pertanahan Nasional menjadi krusial dalam memberikan pendampingan serta merumuskan solusi yang tepat dan terstruktur.



Gambar 1. Foto Bersama Warga Dalam *FGD* Pertama Bersama Narasumber dan Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

- b. *Forum Group Discussion* kedua mengangkat tema pengelolaan Dana *Community Development* di lingkungan desa dan peningkatan pemahaman mengenai tindak pidana yang seringkali terjadi di Dusun. Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* kedua mengenai pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan tindak pidana di daerah dusun, terungkap bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memahami secara memadai aspek hukum terkait hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa *Community Development* yang berasal dari perusahaan yang beroperasi di sekitar desa. Masalah CSR, difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum, termasuk terkait pengelolaan dana CSR perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah dusun. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sebelumnya belum memahami mekanisme hukum yang mengatur CSR dan hak masyarakat atas manfaat sosial perusahaan. Lalu diketahui juga bahwa di Dusun Cioray kerap kali terjadi pencurian hewan maupun santet/sihir yang dialami beberapa warga. Maka, mengingat adanya delik tersebut menjadi tantangan bagi Hansip maupun Kepolisian yang terdekat untuk memberikan edukasi maupun menjaga keamanan di dusun Cioray. Pasca diskusi usai, masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap aspek hukum dasar, terutama mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana CSR serta tindak pidana. Temuan ini sejalan dengan teori kesadaran hukum masyarakat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kepatuhan dan pemahaman hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Soekanto, 2014).



Gambar 2. Foto Bersama Warga Dalam *FGD* Kedua Bersama Narasumber dan Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

Dengan demikian, *Forum Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana tidak hanya menjadi sarana identifikasi masalah, tetapi juga berfungsi sebagai media pemberdayaan hukum yang memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan dalam hubungan dengan perusahaan dan pemerintah desa.

2. Mahasiswa/I Mengajar atau *Teaching*

Pada kegiatan ini dilakukan di lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Islam bertujuan untuk meningkatkan literasi dan motivasi belajar anak-anak. Berdasarkan temuan lapangan, kegiatan ini mampu meningkatkan antusiasme belajar peserta didik, terutama karena metode pembelajaran yang digunakan bersifat interaktif dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan teori pendidikan sebagai sarana pemberdayaan, yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat. Dalam konteks Dusun Cioray, kegiatan *teaching* menjadi sarana awal dalam membangun kesadaran pentingnya pendidikan sebagai modal sosial jangka panjang. *Teaching* yang dilakukan oleh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pancasila memberikan pengajaran dasar berupa Hitungan dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bagi anak kelas satu hingga tiga, sedangkan kelas empat sampai enam diajarkan mengenai *Grammar* dalam bahasa inggris dan secara umum mengajarkan lagu-lagu khas yang berada di Jawa Barat berupa Manuk Dadali, Tokecang, Bubuy Bulan.



Gambar 3. Kegiatan *Teaching* di MI Hidayatul Islam Oleh Tim Pelaksana
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

3. Penyuluhan Hukum

Menurut asas *presumption iures de iure* atau fiksi hukum bahwa setiap warga negara dianggap mengetahui semua produk hukum. Melalui asas tersebut menguatkan penulis bahwa hukum menjadi bagian yang wajib dipahami dan tak disepelekan oleh setiap warga. Maka, melalui Bina Desa 2025 diadakannya penyuluhan hukum dengan tema “Menjadikan Masyarakat Desa Leuwikaret yang cerdas, paham dan taat hukum.” Penyuluhan Hukum yang dibawakan oleh Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H. dan Amiruddin, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan memberikan pemahaman bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam pembentukan peraturan desa dengan catatan adanya pihak yang bisa menampung dan menghimpun setiap aspirasi warga desa agar dapat menjadi acuan dalam setiap pembentukan peraturan desa atau peraturan lain yang berhubungan dengan Desa Leuwikaret. Kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh beberapa Masyarakat Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor. Dengan demikian melalui penyuluhan hukum yang diadakan oleh panitia Bina Desa 2025 memberikan sebuah kekuatan dan harapan bagi warga supaya mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pembentukan peraturan. Lalu untuk mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengarkan (*Right to be heard*) dan setiap pernyataan yang dikemukakan dapat dipertimbangkan (*Right to be considered*).



Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

4. Pemeriksaan Kesehatan

Kegiatan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada seluruh masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya kesehatan preventif. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat merasa terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis, pemberian obat secara gratis dan pemeriksaan dasar, mengingat keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan formal. Temuan ini sejalan dengan konsep Paradigma Sehat dalam kebijakan pembangunan kesehatan nasional Indonesia, yang menekankan bahwa pembangunan kesehatan harus berfokus pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan (Kemenkes RI, n.d.). Pemeriksaan kesehatan ini juga menjadi sarana awal dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup di Dusun Cioray.



Gambar 5. Foto Bersama Warga Dalam Rangka Pemberian Obat Gratis oleh Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



Gambar 6. Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Kepada Masyarakat oleh Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

5. Pembangunan Dan Peremajaan Sarana Prasarana

Program pembangunan infrastruktur difokuskan pada perbaikan sarana pendidikan dan lingkungan, seperti perbaikan fasilitas sekolah dan pengelolaan sampah. Hasil observasi menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keamanan belajar siswa serta kebersihan lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan konsep pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Ndraha, yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di tingkat desa tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendorong pemberdayaan dan kemandirian masyarakat (Ndraha, 2003). Dalam konteks Dusun Cioray, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga meningkatkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas bersama. Pembangunan yang dilakukan oleh para Mahasiswa/i berupa tempat pembakaran sampah di halaman balai warga dusun Cioray dan Adanya peremajaan berupa fasilitas di MI Hidayatul Islam meliputi ruang kelas, lapangan sekolah, meja, kursi dan papan tulis. Sedangkan fasilitas warga meliputi gapura dusun Cioray, peremajaan kamar mandi dan balai desa sekaligus ruang kelas PAUD.



Gambar 7. Salah Satu Hasil Pembangunan Tempat Sampah oleh Tim Pelaksana
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



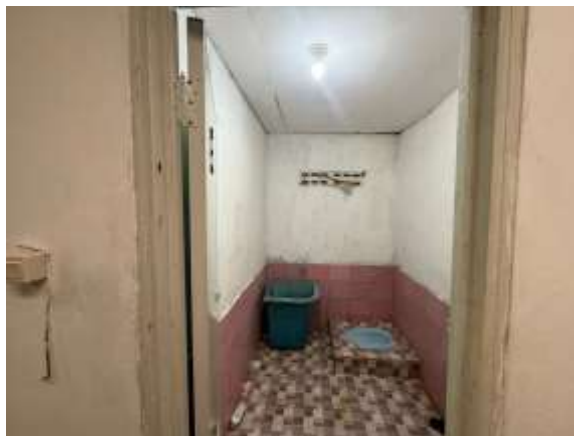
Gambar 8. Salah Satu Hasil Peremajaan Sarana Prasarana Gapura Dusun Cioray oleh Tim Pelaksana
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



Gambar 9. Salah Satu Hasil Peremajaan Sarana Prasarana Lapangan Sekolah oleh Tim Pelaksana
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



Gambar 10. Salah Satu Hasil Peremajaan Fasilitas Sekolah MI Hidayatul Islam oleh Tim Pelaksana
(Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



Gambar 11. Salah Satu Hasil Peremajaan Fasilitas Kamar Mandi oleh Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).



Gambar 12. Salah Satu Hasil Peremajaan Balai Desa Sekaligus PAUD oleh Tim Pelaksana (Sumber: Dokumen Penulis, 2025).

Secara keseluruhan, implementasi lima program bina desa di Dusun Cioray menunjukkan bahwa pendekatan terpadu yang menggabungkan aspek pendidikan, hukum, kesehatan, dan infrastruktur mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat. Temuan ini sejalan dengan kajian pembangunan desa terpadu di Indonesia yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai dimensi pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Rizkwanti dan Kurniawan dalam *Integrated Rural Development: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis di Indonesia*, pembangunan desa yang bersifat terintegrasi—meliputi pembangunan sosial, ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat—mampu meningkatkan produktivitas, infrastruktur pendukung, serta pengembangan sosial di wilayah pedesaan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan program

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program bina desa di Dusun Cioray. Pertama, adanya partisipasi aktif masyarakat, terutama tokoh masyarakat dan perangkat desa, yang mempermudah proses sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan. Partisipasi ini memperkuat legalitas program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Kedua, dukungan institusional dari perguruan tinggi, khususnya mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Kehadiran akademisi memungkinkan transfer pengetahuan dan keterampilan secara sistematis kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi, yang menempatkan perguruan tinggi sebagai agen perubahan sosial.

Namun dengan demikian, kami juga menemukan beberapa faktor penghambat selama pelaksanaan lima program di Dusun Cioray. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan program, sehingga tidak semua permasalahan masyarakat dapat ditangani secara optimal. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam proses penyampaian materi, khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum yang membutuhkan pemahaman konsep normatif.

C. Analisis Hasil dan Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lima program bina desa di Dusun Cioray memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat di bidang pendidikan, hukum, kesehatan, dan lingkungan. Keberhasilan ini didukung oleh pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat turut dilibatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program desa binaan di Indonesia yang menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dirancang secara partisipatif mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi tantangan lokal dan mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan (Amir, M., Ibrahim, H., & Bakri, 2025).

Secara normatif, temuan ini juga menunjukkan pentingnya peran negara dan institusi pendidikan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, kegiatan bina desa dapat dipandang sebagai bentuk konkret pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara melalui sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam pengelolaan dana CSR perusahaan di wilayah mereka.

Pelaksanaan bina desa secara langsung sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap program pembangunan desa serta meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan. Partisipasi ini juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan keterampilan antarwarga, sehingga program bina desa tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membangun kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Faktor pendukung lainnya dalam pelaksanaan bina desa adalah peran kepemimpinan aparatur desa yang responsif dan kolaboratif. Kepala desa dan perangkat desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal.

Implementasi program kerja di Dusun Cioray dapat dikategorikan berhasil secara normatif dan operasional, ditinjau dari ketercapaian tujuan program serta terlaksananya seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan kerangka perencanaan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan tercermin pada adanya *output* program yang nyata serta respons awal masyarakat yang menunjukkan penerimaan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau secara substantif. Rendahnya tingkat pemahaman sebagian warga terhadap rasionalitas, urgensi tanah bersertifikat, dan manfaat jangka panjang program menjadi faktor pembatas dalam proses internalisasi nilai dan keberlanjutan dampak program.

Di samping itu, kondisi geografis berupa jauhnya akses menuju kampung merupakan kendala struktural yang berdampak pada efektivitas sosialisasi, intensitas pendampingan, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan program kerja di wilayah pedesaan tidak hanya ditentukan oleh aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi strategi komunikasi dan intervensi terhadap karakteristik sosial.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi lima program bina desa di Dusun Cioray, Desa Leuwikaret, Kabupaten Bogor, yaitu *FGD*, teaching, penyuluhan hukum, pemeriksaan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program yang bersifat partisipatif dan kontekstual mampu meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan, hukum, kesehatan, dan lingkungan secara nyata.

Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh partisipasi aktif Mahasiswa dan masyarakat, peran tokoh lokal, serta dukungan institusional dari perguruan tinggi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan waktu dan rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian masyarakat, khususnya dalam kegiatan yang memerlukan pemahaman konseptual seperti penyuluhan hukum. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih berkelanjutan dan pendampingan jangka panjang agar dampak program bina desa dapat terus ditingkatkan.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa program kerja yang telah berjalan efektif dan mencapai sebagian besar target yang direncanakan oleh panitia pelaksana. Melihat dari dampak positif dapat dirasakan oleh warga Dusun Cioray. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan kurangnya pemahaman secara mendalam kepada setiap warga. Tantangan tersebut tidak meniadakan keberhasilan, melainkan menjadi dasar refleksi maupun evaluasi. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan, inovasi, serta penguatan sinergi sangat diperlukan agar program yang berkelanjutan dan semakin berdampak optimal bagi masyarakat.

E. Referensi

- Amir, M., Ibrahim, H., & Bakri, S. (2025). Efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan program desa binaan di Kabupaten Pangkep. *Agricultural Review*, 4(2).
- Cohen, J.M. & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development. *Seeking Clarity through Specificity, World Development*, 8(3).
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat. In *Kemenkes RI*.
- Metroheadline.net. (n.d.). *Lambat, Rumit dan Banyak Pungli, Masyarakat Minta Kantor BPN Kab Bogor Diperiksa*. Retrieved June 19, 2025, from metroheadline.net/lambat-rumit-dan-banyak-pungli-masyarakat-minta-kantor-bpn-kab-bogor-diperiksa/
- Ndraha, T. (2003). *Pembangunan Masyarakat Desa*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Sekretariat Negara. 2012.